

POLITISASI IDENTITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Di Kec. Malaka Barat dan Kec. Weliman Pada Pilkada Malaka 2020)

Robianus Nahak¹, Dian Festianto², Melkianus Suni³

*robinahak1998@gmail.com*¹, *dianfestianto@yahoo.com*², *melkysuny2345@gmail.com*³

¹²³Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Timor

Abstrak

Pemilu merupakan proses politik yang secara konstitusional bersifat niscaya bagi negara demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Politisasi Identitas mempengaruhi proses Pilkada Kabupaten Malaka Tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini antara lain: Isu-isu etnis sebagai instrumen dukungan politik, Tua-tua adat sebagai instrumen politik, Penggunaan sarana-sarana adat, Struktur adat yang mendekatkan diri dengan konstituen dan Mobilisasi, komunitas etnis. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian mencakup antara lain; kedua paslon memanfaatkan isu-isu etnis untuk memperoleh dukungan, memanfaatkan kedudukan tua-tua adat untuk mendapatkan dukungan, memanfaatkan sarana-sarana adat seperti sirih pinang dan selendang, menjanjikan untuk memberikan pekerjaan kepada pendukung, adanya dukungan basis dan ikatan keluarga, menjanjikan insentif kepada tua-tua adat, janji renovasi rumah adat, menjanjikan kartu kerja, dan balas budi/balas jasa. Dengan merujuk pada teori politik identitas untuk menjelaskan bagaimana karakteristik memengaruhi preferensi pemilih. Dengan mengungkap dinamika politik lokal yang berkaitan dengan identitas, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman lebih lanjut tentang proses demokrasi di tingkat daerah

Kata Kunci : Politisasi Identitas, Pilkada kabupaten Malaka, janji politik, dan sarana adat

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan proses politik yang secara konstitusional bersifat niscaya bagi negara demokrasi. Sebagai sistem, demokrasi nyata-nyata telah teruji dan diakui paling realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, politik, ekonomi yang populis, adil dan beradab, kendati bukan tanpa kelemahan. Politik identitas dalam sebuah negara demokrasi merupakan sebuah keniscayaan. Kemunculannya merupakan salah satu konsekuensi logis dari diterapkannya paham demokrasi dalam sebuah negara, dimana salah satu asas demokrasi yang paling penting adalah pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang dijunjung tinggi oleh negara. Hak-hak dasar tersebut diantaranya adalah *freedom of expression* (kebebasan berekspresi) yang menjamin setiap individu untuk menentukan preferensi politiknya, tentang suatu masalah, terutama yang menyangkut dirinya dan masyarakat disekitarnya. *Freedom of expression* (kebebasan berekspresi) ini yang menjadi dasar bagi beberapa individu yang merasa memiliki kesamaan baik secara pemikiran, ideologi, dan identifikasi tertentu untuk sepakat membentuk sebuah identitas dengan tujuan mengartikulasikan kepentingan yang didasarkan pada identitas tersebut (Rendy Adiwilaga Dkk, 2018:273).

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka tahun 2020 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu: pasangan calon

nomor urut 1 (satu) Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin (SN-KT); dan pasangan calon nomor urut 2 (dua) Stefanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin (SBS-WT) yang dinyatakan sebagai pasangan calon Bupati Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka tahun 2020.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka tahun 2020 sangat ditentukan oleh strategi politik yang dilaksanakan antara lain merawat ketokohan, menetapkan kelembagaan politik, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus. Akan tetapi juga ditentukan oleh primordialisme dan politik aliran.

Kabupaten Malaka terbagi atas 12 Kecamatan serta 127 desa dengan jumlah penduduk di tahun 2020 berjumlah 183.900 jiwa. Hasil perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Malaka 2020. Pasangan Dr. Simon Nahak, S.H.,MH-Louise Lucky Taolin, S.Sos (SN-KT) yang memperoleh Kemenangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 dengan meraih 50.890 suara (50,49%) atau unggul dengan 984 suara dari Pasangan dr. Stefanus Bria Seran, M.PH-Wendelinus Taolin (SBS-WT) yang meraih perolehan 49.906 suara (49,51%) yang tersebar di 12 Kecamatan dan 395 TPS di Kabupaten Malaka.

Berikut perolehan suara Lengkap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 di dua belas (12) kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Malaka 2020 di 12 Kecamatan

Kecamatan	Dr. Simon Nahak, S.H.,MH-Louise Lucky Taolin, S.Sos (SN-KT)	dr Stefanus Bria Seran, M.PH- WendelinusTaolin (SBS-WT)
Malaka Tengah	11.732	10.103
Malaka Barat	6.346	6.013
Wewiku	5.735	4.639
Weliman	4.665	6.365
Rinhat	3.550	3.539
Io Kufeu	802	3.539
Sasitamean	1.861	2.812
Laen Manen	4.181	2.754
Malaka Timur	3.225	2.096
Kobalima Timur	2.036	1.672
Kobalima	5.166	4.652
Botin Leo Bele	1.591	1.022
Total	50.890 (50,49%)	49.906 (49,51%)

Tabel 1.2 Hasil perolehan suara di 16 Desa Kecamatan Malaka Barat

Desa	Dr. Simon Nahak, S.H.,MH-Louise Lucky Taolin, S.Sos (SN-KT)	dr. Stefanus Bria Seran, M.PH- WendelinusTaolin (SBS-WT)
Motaulun	600	388
Sikun	247	394
Fafoe	660	552
Lasaen	504	477
Umatoos	644	930
Rabasahain	337	235
Umalor	489	415
Besikama	446	417
Maktihan	723	238
Loofoun	172	324
Rabasa	73	319
Rabasa Haerain	359	289
Motaain	233	171
Oan Mane	264	363
Raimataus	249	239
Naas	346	262

Tabel 1.3 Hasil perolehan suara di 12 Desa Kecamatan Weliman

Desa	Dr. Simon Nahak, S.H.,MH-Louise Lucky Taolin, S.Sos (SN-KT)	dr. Stefanus Bria Seran, M.PH- WendelinusTaolin (SBS-WT)
Angkaes	466	508
Bonetasea	213	319
Forekmodok	370	316
Haitimuk	132	1541
Haliklaran	335	468
Kleseleon	261	309
Lakulo	576	564
Lalaten	522	450
Lamudur	402	257
Leunklot	379	257
Taaba	186	228
Umalawain	347	472
Wederok	391	375
Wesey	85	332

Secara keseluruhan di 12 kecamatan pada pilkada Kabupaten Malaka 2020, kemenangan didapat oleh Pasangan Dr. Simon Nahak, S.H.,MH-Louise Lucky Taolin, S.Sos (SN-KT). Dari 12 kecamatan di kabupaten Malaka, kecamatan Malaka Barat dan Kecamatan Weliman menjadi fokus utama kajian penelitiannya.

Dari kedua kecamatan ini kedua pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati berbagi kemenangan di dua kecamatan tersebut. Pasangan no. urut 1 (satu) mengungguli pasangan no. urut 2 (dua) di 11 desa dan pasangan calon no. 2 (dua) menang di 5 desa kecamatan Malaka Barat. Kemenangan Simon Nahak dan Kim Taolin di kecamatan Malaka Barat dikarena ada tiga suku besar yang menyatakan sikap untuk dukung paket SN-KT.

Kemenangan serupa didapat oleh pasangan calon no. urut 2 (dua) mengungguli pasangan calon no. urut 1 (satu) di 8 desa dan pasangan no. urut 1 (satu) menang di 6 desa kecamatan Weliman. Kemenangan Stefanus Bria Seran dan Wendelinus Taolin di kecamatan Weliman dikarenakan kecamatan Weliman basis pemilih SBS-WT. Dari kemenangan tersebut penulis memiliki hipotesis bahwa kedua pasangan calon memiliki strategi masing-masing dan tidak terlepas dari adanya produk atau penerapan politik yang menjadi ciri khasnya kedua calon, sehingga membuat kedua pasangan calon menjadi pemenang di dua kecamatan tersebut.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka antara lain menggalang dukungan melalui Sentimen Etnis, Diskriminasi dan Intimidasi antar kelompok serta pendekatan yang dilakukan melalui bahasa daerah. Selain itu juga adanya indikasi politik yaitu janji politik berupa insentif kepada tua adat dan kepala suku, janji kerja, dan adanya hubungan keluarga kedua paslon dan pemilih. Terdapat juga beberapa janji yaitu akan dibuatkan kartu kepada kelompok-kelompok yang sengaja dibentuk untuk mendapatkan dukungan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yakni penulis melakukan pengamatan langsung atau observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode deskriptif adalah metode yang di gunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek,

suatu kondisi dan suatu sistem pemikiran serta peristiwa yang akan terjadi.

Fokus analisis antara lain :

- a. Isu-isu etnis sebagai instrumen dukungan politik.
- b. Tua-tua adat sebagai instrumen politik.
- c. Penggunaan sarana-sarana adat.
- d. Struktur adat yang mendekatkan diri dengan konstituen.
- e. Mobilisasi komunitas etnis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Informan yang di anggap paham tentang masalah yang di kaji.

penelitian ini menggunakan teknik sampling yang digunakan adalah *Non-probability Sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Isu-Isu Etnis Sebagai Instrumen Dukungan Politik

Pemanfaatan isu etnis sebagai suatu instrumen politik dapat memberikan dampak positif maupun negatif dimana jika kelompok etnis memiliki pemahaman politik yang baik maka akan memilih pemimpin yang baik yang mengutamakan pembangunan daerah ke depan akan tetapi dampak negatifnya jika pemanfaatan kelompok etnis tidak sesuai dengan kode etik pemilu seperti profokator, tidak bijak dalam menggunakan media sosial seperti menyebarkan berita hoax, tidak santun maka akan memberikan citra buruk pada demokrasi.

Isu Etnisitas adalah isu yang sangat rentan menjadi komoditi politik pada setiap Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan etnis bisa saja dimobilisasi dan dimanipulasi hanya untuk kepentingan beberapa kelompok. Perbedaan bangsa Indonesia, merupakan faktor yang menyebabkan politisasi etnis berkembang di masyarakat. Tentunya perbedaan tersebut merupakan entitas kebangsaan yang harus dibanggakan, karena dari kebhinekaan itu pula integrasi nasional terbentuk, walaupun konsekuensi logis dari negara kebangsaan yang heterogen adalah resiko terkotak-kotak dan ancaman timbulnya disintegrasi.

Dalam upaya memenangkan ajang pemilu, elite politik memanfaatkan isu politik identitas dalam kampanye dengan tujuan untuk mengerahkan dukungan calon pendukung ke calon tertentu sehingga dukungan yang didapat bukan karena visi dan misi para bakal calon, tetapi karena perbedaan identitas etnis. Menguatnya isu politisasi etnis dalam pelaksanaan pilkada merupakan sesuatu

yang tidak bisa dihindari. Penguatan politisasi etnis sebenarnya dalam batas-batas tertentu bermakna positif, misalnya untuk menguatkan ikatan primordial/kedaerahan yang selama ini semakin terdegradasi karena terkikis oleh arus modernisme dan budaya materialisme.

Berbagai bentuk ikatan primordialisme/etnis yang melekat dalam alam bawah sadar manusia itu mudah sekali dibangkitkan atau ditumbuhkan untuk berbagai tujuan dan kepentingan. Oleh karena itu, mereka yang merasa terikat dalam ikatan primordial mudah sekali digerakkan atau dimobilisasi untuk tujuan politik seperti pilkada, apalagi jika pelaksanaan pilkada itu dimaknai sebagai suatu ancaman terhadap kepentingan dan eksistensi kelompok etnis tertentu. Kelompok etnis yang merasa akan dirugikan atau sebaliknya akan diuntungkan tentunya akan merapatkan barisan atau melakukan konsolidasi berdasarkan pembelahan etnik, agama, atau golongan. Dalam konteks politik lokal di kabupaten Malaka, penggunaan politisasi identitas etnis sebagai instrumen dukungan politik merupakan fenomena yang umum terjadi. Elit politik sering menggunakan isu-isu etnis untuk memperoleh dukungan masa, terutama dalam kelompok etnis tertentu. Hal ini terjadi pada pemilihan kepala daerah kabupaten Malaka 2020, dimana kedua paslon mencoba untuk memanfaatkan isu etnis sebagai strategi utama untuk mendapatkan dukungan dari berbagai komunitas etnis.

2) Tua-Tua Adat Sebagai Instrumen Politik

Penggunaan tua-tua adat sebagai instrumen politik merupakan strategi politik suatu paslon untuk meningkatkan elektabilitas serta bisa menjadi daya tarik bagi tua-tua adat untuk mengarahkan anggota kelompoknya (masyarakat yang ada dalam suatu suku) untuk memilih paslon tertentu seorang tokoh adat biasanya memimpin suatu upacara adat, mempertahankan cara hidup secara adat, menjelaskan makna dan filosofi dari suatu adat kaumnya. Tokoh biasanya seseorang yang diakui oleh masyarakat setempat sebagai pemimpin atau wakil masyarakat dalam masalah-masalah adat. Zanudin (2021). Mereka sering dianggap sebagai penghubung antara masyarakat adat dan pemerintah atau pihak asing.

Kepercayaan masyarakat dapat dibentuk melalui kepemimpinan yang baik, pengalaman, dan kontribusi yang diberikan oleh seseorang kepada masyarakat. Hal ini menjadikan tokoh adat sebagai sosok yang dihormati dan diakui oleh masyarakat setempat. seorang tokoh adat memiliki peran

dan pengaruh yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah. Dinamika Politik tokoh-tokoh adat sangat berpengaruh terhadap masyarakat adat, karena masyarakat ini sangat patuh terhadap tetua adat di setiap daerahnya sehingga Ketika ketua adatnya mengatakan bagi masyarakat itu menjadi sebuah perintah namun tidak tertulis jadi apa yang di katakan oleh tokoh adat tersebut maka secara otomatis itulah yang akan di ikuti oleh masyarakatnya.

Peran tua-tua adat di Pilkada kabupaten Malaka sangat signifikan dalam politik lokal. Mereka bukan hanya menjaga adat dan tradisi, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang kuat dalam membentuk preferensi politik masyarakat setempat. Kehadiran mereka sering menjadi faktor penentu dalam pemilihan kepala daerah, dan mampu mengarahkan dukungan dari komunitas etnis. Dengan berbagai macam janji untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari tua adat, sehingga dengan kedudukan tua adat sebagai pemangku adat dengan mudahnya mengarahkan komunitas etnis untuk mendukung paslon tertentu.

3) Penggunaan Sarana-Sarana Adat

Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa dalam berpolitik harus mengatahui dan memahami sarana-sarana atau fasilitas mana yang sesuai dengan aturan untuk digunakan dan sarana-sarana mana yang tidak boleh digunakan untuk berpolitik.

Sarana adalah segala sesuatu seperti alat, media, dan rumah adat yang merupakan bangunan tradisional yang memiliki nilai simbolis dalam budaya masyarakat. Rumah adat sebagai tempat berkampanye mencerminkan nilai-nilai simbolis dalam budaya. Sombil-simbol adat seperti sirih pinang dan selendang dapat digunakan untuk membangun citra politik yang positif. Dengan demikian, penggunaan instrumen rumah adat sebagai tempat berkampanye dan penggunaan simbol-simbol adat seperti sirih pinang dan selendang tidak hanya memiliki dimensi praktis dalam memperoleh dukungan politik, tetapi juga mengandung nilai-nilai simbolis yang mendalam, dalam membangun identitas dan citra politik yang digunakan untuk mencapai tujuan. Penggunaan sarana -sarana adat dalam politik adalah sebagai salah satu bentuk tujuan untuk mendapatkan suara atau dukungan dari tokoh-tokoh adat. Dengan menggunakan sarana-sarana adat dapat menyakinkan masyarakat untuk memilih suatu paslon yang dianggap masyarakat mempunyai kesamaan dalam hal budaya dan hal lainnya

yang dapat menonjolkan masyarakat adat setempat.

Penggunaan sarana adat ini di salah satu sisi sebagai bentuk dukungan dari suatu struktur adat kepada paslon tertentu karena adanya ajakan dari paslon untuk membantu paslon dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini bermula dari kedatangan pasangan calon kepala daerah mendatangi pemangku adat terutama para pemangku adat yang mempunyai peran sentral dalam lembaga adat. Kedatangan paslon selain meminta petunjuk juga untuk mengajak bergabung dalam tim pemenangan.

4) Struktur Adat Yang Mendekatkan Diri Dengan Konstituen

Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa struktur adat ini memiliki akses atau jaringan sosial yang luas sehingga menjadi rebutan para paslon dan selagi struktur adat ini memiliki pemahaman politik yang baik dan tidak merusak citra politik maka menjadi hal yang positif dalam demokrasi.

struktur adat yang yang mendekatkan diri dengan konstituen artinya bahwa struktur adat itu sering memiliki akses yang unik. Mereka memiliki jaringan sosial yang kuat ditingkat lokal dan dapat berinteraksi langsung dengan warga masyarakat secara personal. Selain itu juga struktur adat ini sering mewakili beragam kelompok etnis atau sosial dalam masyarakat, mereka dapat menjadi saluran komunikasi yang efektif antara kandidat dan pemilih dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian paslon menjalin kerjasama erat dengan tua-tua adat, membentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, terjadi perjanjian dimana paslon yang mereka dukung berkomitmen untuk memberikan peluang kerja kepada anggota komunitas etnis jika berhasil memenangkan pemilihan dan komunitas etnis akan memberikan dukungan. Sebelum kesepakatan tersebut terwujud, terjadi proses negosiasi antara kedua belah pihak, yang kemudian dicatat dalam sebuah kontrak politik yang mengikat. Kontrak politik ini menjadi dasar bagi hubungan yang harmonis antara paslon dan komunitas etnis, sambil memastikan kepentingan bersama terwujud dengan transparansi dan keadilan yang meyakinkan.

Dalam pemilihan kepala daerah struktur adat sangat penting karena struktur adat ini memiliki posisi dan daya tawar yang kuat. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap hak suara yang di miliki oleh masyarakat karena mereka akan melihat kemana arah pilihan yang akan di tentukan oleh struktur adat, meski ada sebagian kecil masyarakat

yang memilih sesuai keinginan pribadi namun lebih dominan pilihan mereka mengikuti struktur atau ketua adat mereka. Dinamika politik di lembaga adat sangat berpengaruh terhadap masyarakat adat, karena masyarakat ini sangat patuh terhadap tetua adat di setiap daerahnya sehingga ketika tetua adatnya mengatakan bagi masyarakat itu menjadi sebuah perintah namun tidak tertulis jadi apa yang di katakan oleh tokoh adat tersebut maka secara otomatis itulah yang akan di ikuti oleh masyarakatnya.

5) Mobilisasi Komunitas Etnis

Berdasarkan hasil, disimpulkan bahwa mobilisasi atau perpindahan kelompok etnis pada suatu paslon tertentu karena paslon tertentu memiliki kesamaan visi dan misi atau kesamaan harapan dimasa mendatang.

Mobilisasi didefinisikan sebagai pengembangan sebuah hubungan sosial (merujuk pada istilah yang digunakan Weber) sesuai dengan penjelasan pada Jeffrey A. Karp and Susan A. Banducci (2007:217) antara dua actor, individu dan partai. Konsep aktivitas mobilisasi terdiri dari 3 proses. Proses kepentingan (dimensi kognitif), proses pembentukan komunitas (dimensi affective), dan proses pemanfaatan instrumen (dimensi instrumental). Mobilisasi politik didefinisikan sebagai usaha actor untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan. Suatu variabel directional diperkenalkan dalam rangka menggambarkan dengan tepat jenis hubungan yang berkembang antara partai dan individu.

Peran komunitas etnis dalam Pilkada tidak hanya dalam sebatas direkrut menjadi tim pemenangan namun lebih dari pada itu. Para komunitas etnis yang telah menjadi tim pemenangan berfungsi lebih lanjut untuk membantu kemenangan calon kepala daerah yang telah mereka dukung, salah satunya melalui jalan mobilisasi pemilih. Mobilisasi pemilih tersebut dilakukan dengan memanfaatkan basis massa atau basis legitimasi komunitas etnis dari setiap suku atau dengan memanfaatkan struktur hierarki pada lembaga adat untuk memobilisasi para pemangku adat atau penghulu adat yang posisinya berada ditingkat bawah dalam struktur hierarki kepemimpinan pada lembaga adat oleh penghulu adat yang memiliki posisi lebih tinggi. Mobilisasi tidak hanya berlangsung dengan memobilisasi pemangku adat berdasarkan hierarki, namun setiap pemangku adat juga memobilisasi kepada basis massa dari komunitas suku mereka masing-masing.

Dalam konteks perolehan suara di Kecamatan Malaka Barat dan Kecamatan Weliman, kedua pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati memiliki dinamika yang menarik. Paslon 01 berhasil mengungguli Paslon 02 di 11 desa Kecamatan Malaka Barat, sementara Paslon 02 memenangkan 8 desa di Kecamatan Weliman, yang merupakan basis pendukung utamanya. Namun, terdapat juga desa-desa di kedua kecamatan tersebut di mana Paslon 02 berhasil meraih kemenangan. Di Kecamatan Malaka Barat, Paslon 02 memenangkan 5 desa, sedangkan di Kecamatan Weliman, Paslon 01 berhasil memenangkan 6 desa. Perbedaan perolehan suara antara kedua pasangan calon cukup signifikan di kedua kecamatan. Di Kecamatan Malaka Barat, perolehan suara Paslon 01 sebanyak 6.346 suara, sedangkan Paslon 02 mendapat 6.013 suara, dengan selisih yang relatif kecil hanya sekitar 333 suara. Namun, di Kecamatan Weliman, perbedaan perolehan suara jauh lebih besar. Paslon 01 hanya mendapatkan 4.665 suara, sementara Paslon 02 berhasil meraih 6.365 suara, dengan selisih yang mencapai 1.700 suara. Hal ini menunjukkan keberhasilan Paslon 02 dalam memperoleh dukungan yang kuat dari pemilih di Kecamatan Weliman, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti basis pendukung yang solid dan strategi kampanye yang efektif.

Faktor kesukuan dan keluarga memainkan peran penting dalam mempengaruhi dukungan pemilih terhadap kedua pasangan calon. Kedua pasangan calon masih memiliki ikatan keluarga, yang menjadi faktor penentu dalam beberapa desa di Kecamatan Malaka Barat, di mana mayoritas pendukung Paslon 01 adalah terdapat beberapa suku yang mendukung mereka. Begitu juga di Kecamatan Weliman, di mana basis pendukung utama Paslon 02 memengaruhi hasil pemilihan.

Dari perolehan suara dan dinamika politik yang terjadi, terlihat bahwa kedua pasangan calon memiliki strategi kampanye yang berbeda-beda dan memanfaatkan faktor-faktor seperti kesukuan, keluarga, dan basis pendukung untuk meraih dukungan pemilih. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam proses demokrasi lokal dan peran penting dari interaksi antara faktor-faktor politik, sosial, dan budaya dalam menentukan hasil pemilihan.

Selain faktor-faktor sebelumnya, marga dari pasangan calon seperti "Nahak dan Bria Seran", juga memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi preferensi pemilih. Pemilih cenderung condong memilih pasangan calon yang memiliki hubungan keluarga atau kesamaan marga dengan mereka, karena hal ini mencerminkan adanya ikatan emosional atau solidaritas sosial yang

kuat dalam budaya dan tradisi lokal. Dengan demikian, identitas marga menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan pemilih dalam memilih pasangan calon tertentu.

Dan juga faktor lain yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan dukungan terhadap kedua calon antara lain, menjanjikan insentif kepada kepala suku, menjanjikan renovasi rumah adat, balas budi, dan menjanjikan kartu kerja kepada kelompok masyarakat oleh kedua kandidat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemanfaatan isu etnis sebagai suatu instrumen politik dapat memberikan dampak positif maupun negatif dimana jika kelompok etnis memiliki pemahaman politik yang baik maka akan memilih pemimpin yang baik yang mengutamakan pembangunan daerah ke depan akan tetapi dampak negatifnya jika pemanfaatan kelompok etnis tidak sesuai dengan kode etik pemilu seperti profokator, tidak bijak dalam menggunakan media sosial seperti menyebarkan berita hoax, tidak santun maka akan memberikan citra buruk pada demokrasi.
2. Penggunaan tua-tua adat sebagai instrumen politik merupakan strategi politik suatu paslon untuk meningkatkan elektabilitas serta bisa menjadi daya tarik bagi tua-tua adat untuk mengarahkan anggota kelompoknya (masyarakat yang ada dalam suatu suku) untuk memilih paslon tertentu.
3. Penggunaan sarana-sarana adat sebagai instrumen politik merupakan suatu kebiasaan atau adat istiadat secara turun temurun yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu yang datang sehingga selagi penggunaan sarana adat tidak melanggar etika maka itu adalah suatu hal yang positif.
4. Struktur adat memiliki akses atau jaringan sosial yang luas sehingga menjadi rebutan para paslon dan selagi struktur adat ini memiliki pemahaman politik yang baik dan tidak merusak citra politik maka menjadi hal yang positif dalam demokrasi
5. Mobilisasi atau perpindahan kelompok etnis pada suatu paslon tertentu karena paslon tertentu memiliki

kesamaan visi dan misi atau kesamaan harapan di masa mendatang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat diberikan saran kepada KPU Malaka, Bawaslu Malaka, Tim Pemenangan, Tua-tua adat, dan kelompok masyarakat sebagai berikut :

1. KPU

Sebagai penyelenggara KPU Malaka, untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses pemilihan kepala daerah kabupaten Malaka dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tingkat integritas yang tinggi. Pastikan bahwa setiap tindakan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan menjaga netralitas dalam setiap keputusan, sehingga bisa menciptakan Pilkada yang aman, damai dan tentram.

2. Bawaslu

Bawaslu Malaka sebagai badan pengawas, untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pastikan setiap pelanggaran kode etik dan aturan Pemilu segera ditindaklanjuti dengan tindakan yang tepat, sesuai dengan kewenangan Bawaslu, guna memastikan keberlangsungan pemilihan yang bersih dan adil.

3. Tim Pemenangan

Kepada tim pemenangan, untuk mengedepankan kampanye yang bersih, berintegritas, dan berbasis dalam program-program yang konstruktif untuk kesejahteraan masyarakat. Hindari praktik-praktik yang merugikan dan fokuslah pada pendekatan yang membangun, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap calon yang didukung.

4. Tokoh Adat

Kepada tua-tua adat yang memiliki peran penting dalam menjaga kearifan lokal dan memengaruhi preferensi politik masyarakat. Untuk menggunakan pengaruh tersebut dengan bijaksana, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai integritas dan keadilan dalam mendukung calon kepala daerah, serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat diutamakan.

5. Kelompok masyarakat

Kepada kelompok masyarakat, untuk aktif berpartisipasi dalam politik, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga pemantauan jalannya pemerintahan. Dukunglah calon yang memiliki visi dan program nyata untuk kemajuan wilayah ini,

serta ajaklah masyarakat lainnya untuk berperan aktif dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi kabupaten Malaka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah dengan caranya masing – masing telah berkontribusi dan mendukung penulis baik moril maupun materil

DAFTAR PUSTAKA

- Pito Andrianus, Toni 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Nuansa Bandung.
- Ruslan, I. 2015. *Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik*. MADANIA, Vol. XVIII, 161–174. Retrieved from <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=69216663-0fd3-dc3d-4ff0-8cbf475120fd&documentId=9d2a0a37-4a94-3376-8d1c-c3daf9e6e472>
- Ramsey. 2003 “*Bahasa, Etnisitas Dan Potensinya Terhadap Konflik Etnik*” Berlin Sibarani Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. jurnal. 1-11.
- Rendy Adiwilaga-M Ridha Tr Mustabsyrotul Ummah Mustofa. 2018. *Pemilu Dan Keniscayaan Politik Identitas Etnis Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Teoritis*. *Jurnal Bawaslu, Volume 3 N*(January 2017), 269–284.
- Sahalatua, A. P., Hamid, A., & Hikmawan, M. D. (2018). *Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022)* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Setyaningrum, A. 2005. *Memetakan Lokasi Bagi Politik Identitas dalam Wacana Politik Poskolonial dalam “Politik Perlawanan.”* Yogyakarta: IRE.
- Sari, E. 2016. *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. Kritis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(2), 145–156. Retrieved from <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis/article/view/4164>
- Shofan, M. (2018). *Politisasi Agama di Ruang Publik: Ideologis atau Politis? MAARIF Journal*, 13(2), 3–6. Retrieved from <http://www.jurnal-maarifinstitute.org/index.php/maarif/article/view/17>
- Sugiyono, 2017. *Metode penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal Poros Politik
ISSN : 2528-0953

Taylor, C. (1992). *Multiculturalism and the Politics of Recognition*. Princeton University Press.

Widayanti, Titik. 2009. *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria*. UGM. Yogyakarta.